

**ANALISIS KEBIJAKAN PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TERHADAP PEMANFAATAN PRODUK DIGITAL DALAM
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DITINJAU DARI
ASAS *ECONOMIC OF COLLECTION***

Silvia Puspitasari¹, Anugrah Anditya²

ABSTRAK

Dunia ekonomi digital dewasa ini mengalami perkembangan yang signifikan, baik di tingkat global maupun domestik. Nilai transaksi dan nilai ekonomi digital yang tinggi menjadikan potensi penerimaan negara dari sektor pajak atas transaksi elektronik pun terbilang besar. Selain itu, masifnya kegiatan ekonomi digital juga menghadirkan isu keadilan dan netralitas pajak terhadap berbagai bentuk, asal, dan sistem perdagangan. Untuk merespon hal ini, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan pemungutan pajak di sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Salah satu pajak yang diatur dan secara praktis dapat dipungut hingga saat ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui netralitas PPN dalam pemungutan PPN PMSE serta kesesuaiannya dengan asas *economic of collection* perpajakan. Jenis penelitian yang Penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan PPN PMSE di Indonesia telah mengejawantahkan karakteristik netral PPN sesuai dengan parameter dari Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Pemungutan PPN PMSE pun secara praktis dalam beberapa hal telah menunjukkan kesesuaiannya dengan asas *economic of collection* perpajakan, meskipun terdapat sejumlah persoalan yang mejadi kendala pemungutan. Oleh karena itu, kebijakan pemungutan PPN PMSE masih perlu dioptimalkan dengan berbagai upaya untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor perpajakan.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Asas *Economic of Collection*

¹ Mahasiswa Strata Satu (S-1) pada Departemen Hukum Pajak, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen pada Departemen Hukum Pajak, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

ANALYSIS OF VALUE-ADDED TAX APPLICATION POLICY ON THE USE OF DIGITAL PRODUCTS IN TRADE THROUGH ELECTRONIC SYSTEMS IN TERMS OF THE PRINCIPLE OF ECONOMIC COLLECTION

Silvia Puspitasari³, Anugrah Anditya⁴

ABSTRACT

Today's digital economy is experiencing significant development, both at the global and domestic levels. The high transaction value and digital economy value make the potential for state revenue from the tax sector on electronic transactions also fairly large. In addition, the massive digital economy activities also raises the issue of tax fairness and neutrality on various forms, origins, and trading systems. To respond to this, the government then issued a tax collection policy on trading through the electronic system (TTES) sector with the issuance of Law Number 2 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Covid-19 Pandemic and/or in order to Face Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability. One of the taxes that is regulated and practically collectable to date is Value-Added Tax (VAT). This research aims to determine the neutrality of VAT in collecting TTES VAT and its compatibility with the principle of economic collection. The type of this research is normative juridical with qualitative methods. The results showed that the collection of TTES VAT in Indonesia has manifested the neutral characteristics of VAT in accordance with the parameters of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). TTES VAT collection is practically in some ways shown its conformity with the principle of *economic of collection*, although there are a number of problems that become obstacles in the collection process. Therefore, the TTES VAT collection policy still needs to be optimized with various efforts to maximize state revenue from the tax sector.

Keywords: Value-Added Tax, Trading Through Electronic Systems, Economic of Collection Principle

³ Undergraduate Student (S-1) at the Department of Tax Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴ Lecturer at the Department of Tax Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.